

BAB 6

STRATEGI PENYEBARAN PUSAT PERTUMBUHAN

Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi (RPWI) Provinsi Papua Barat memberikan penekanan pada Kawasan Pengembangan (KP) Provinsi Papua Barat yang dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep pengembangan kawasan. Lebih lanjut, identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KP merupakan dasar penyusunan prioritas program pengembangan dan investasi yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut. Di setiap KP, terdapat pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mencakup satu atau lebih komoditas unggulan atau sumberdaya potensial.

6.1. Pengertian Kawasan Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan

Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRN) tahun 2002, kawasan pengembangan didefinisikan sebagai kawasan yang secara teknis dapat digunakan sebagai kawasan pengembangan serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Lebih lanjut, kawasan pengembangan ini memiliki ciri-ciri:

1. Berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah,
2. Meningkatkan devisa dan mendayagunaan investasi,
3. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya,
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian daya dukung sumber daya alam,
5. Melestarikan budaya local dalam kerangka upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya alam.
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengertian kawasan pengembangan pada RPWI Papua Barat ini didasarkan pada konsep yang diajukan oleh Gunn (1994: 126) yang memandang kawasan pengembangan sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah. Suatu kawasan pengembangan merupakan rangkaian kegiatan ekonomi yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi, yang dapat berwujud jaringan jalan, rute penerbangan, atau pelayaran kapal. Setiap kawasan pengembangan memiliki potensi, fasilitas dan pelayanan yang dapat dikembangkan, serta memiliki akses gerbang masuk kawasan yang dapat berupa bandara, terminal, stasiun atau bahkan jalan raya. Kawasan pengembangan dapat merupakan bagian dari wilayah administratif kabupaten/kota atau dapat merupakan kawasan yang memiliki akses lintas wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam RPWI ini, yang dimaksud dengan Kawasan Pengembangan (KP) Provinsi Papua Barat adalah kawasan yang secara teknis difungsikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan. Sedangkan Pusat Pertumbuhan (PP) merupakan bagian integral dari kawasan pengembangan yang merupakan

satu kesatuan pengembangan ekonomi satu atau beberapa komoditas unggulan dan atau sumberdaya alam yang sudah dikembangkan atau akan dikembangkan yang memiliki koridor sirkulasi dan aksesibilitas pelayanan di dalam kawasan pengembangan. Pusat pertumbuhan merupakan simpul-simpul pengikat koridor sirkulasi di dalam satu kawasan pengembangan sebagai pintu gerbang masuk dan keluar antar simpul. Dengan demikian, maka kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan dalam RPWI Provinsi Papua Barat memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kawasan pengembangan adalah areal unggulan untuk pengembangan ekonomi komoditas dan atau sumberdaya alam unggulan tertentu dalam wilayah Provinsi Papua Barat.
2. Pusat pertumbuhan adalah areal pengembangan satu atau lebih komoditas atau sumberdaya alam yang telah menjadi identitas daerah atau berpotensi untuk dikembangkan di dalam satu kawasan pengembangan.
3. Pusat Pertumbuhan dapat (overlap) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, kawasan industri) maupun kawasan konservasi.
4. Memiliki potensi unggulan, baik yang belum maupun yang sudah berkembang.
5. Memiliki batas kawasan secara imajiner, dengan unsur pengikat atau koridor sirkulasi yang menjamin aksesibilitas pelayanan.
6. Memiliki ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan serta layanan sosial ekonomi relatif lebih memadai dibanding yang lainnya.

6.2. Pilihan Strategi

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersebar di seluruh wilayah dengan tingkat keragaman dan keunikan tinggi. Keragaman dan keunikan sumberdaya tersebut dapat dijadikan dasar dalam strategi pembentukan kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan. Faktor-faktor strategis dalam menentukan kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan dideskripsikan sebagai berikut :

1. **Faktor geografis.** Kedekatan geografis merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan. Perencanaan dan pengembangan wilayah akan lebih mudah dilakukan jika jarak fisik kawasan berdekatan. Kedekatan geografis juga akan mempermudah koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kawasan.
2. **Faktor aksesibilitas.** Faktor kedekatan geografis harus ditunjang dengan aksesibilitas yang tinggi. Aksesibilitas diperlukan agar perkembangan di suatu kawasan dapat mempengaruhi perkembangan kawasan lain (adanya keterkaitan di dalam dan di luar kawasan).
3. **Faktor pengikat.** Faktor pengikat merupakan 'tanda' fisik atau nonfisik yang berfungsi sebagai pengikat beberapa pusat pertumbuhan ke dalam suatu kawasan pengembangan. 'Tanda' fisik dapat berupa bentang alam, jalur jalan, atau batas wilayah administratif, sedangkan nonfisik dapat berupa pengaruh suatu budaya tertentu. Kawasan pengembangan yang berada dalam satu faktor pengikat yang sama memiliki

- kecenderungan karakteristik fisik dan nonfisik yang relatif sama sehingga mempermudah perumusan rencana dan program yang akan dilakukan pada pusat-pusat pertumbuhan dalam kawasan pengembangan tersebut.
4. **Faktor komoditas.** Unggulan yang sejenis dan atau komplementer. Suatu kawasan pengembangan hendaknya memiliki komoditas-sumberdaya alam unggulan yang dapat dijadikan tema pengembangan sehingga dapat memunculkan identitas kawasan. Komoditas dan sumberdaya alam unggulan pada setiap pusat pertumbuhan hendaknya sejenis atau komplementer.
 5. **Faktor Keragaman produk unggulan antar kawasan.** Kawasan pengembangan yang terbentuk harus dapat menunjukkan keragaman dan keunikan produk satu sama lain sehingga kekayaan sumberdaya Papua Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
 6. **Faktor penyebaran pertumbuhan.** Kawasan pengembangan yang terbentuk harus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga kesenjangan yang selama ini terus terjadi, baik antar kawasan pengembangan, antar pusat pertumbuhan dan antar pelaku investasi, dapat dikurangi. Pusat pertumbuhan bukan merupakan pemusatan kegiatan, tetapi merupakan sentra-sentra produksi dalam suatu kawasan pengembangan menurut komoditas dan sumberdaya unggulan sejenis atau komplementer.
 7. **Faktor keselarasan.** Pembagian kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan harus selaras dengan penetapan kawasan yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan yang telah ada, antara lain: RTRPJ, RTRW, RPJP dan lain-lain

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Provinsi Papua Barat memiliki kelompok-kelompok kawasan pengembangan dengan beragam potensi yang dapat dikembangkan dengan skala pengembangan yang berbeda-beda. Di dalam kawasan pengembangan terdapat satu atau lebih pusat pertumbuhan yang merupakan simpul-simpul sirkulasi produksi dan jasa yang dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi untuk menjamin aksesibilitas wilayah tinggi. Untuk kepentingan perencanaan, perlu ditentukan kawasan-kawasan pengembangan yang memiliki keunggulan dan dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan provinsi Papua Barat atau yang akan diunggulkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri khas Kabupaten/Kota atau potensial dikembangkan sebagai penciri Kabupaten/Kota. Atas dasar konsep pemikiran di atas, maka pilihan strategis diuraikan sebagai berikut.

6.2.1. Basis Sumberdaya

Provinsi Papua Barat memiliki potensi sumberdaya yang sangat beragam dan unik baik sumberdaya alam maupun sumberdaya Manusia. Keragaman dan keunikan sumberdaya alam tersebut menyebar berdasarkan keseragaman karakteristik wilayah (ekoregion), mulai dari ekosistem kepulauan, ekosistem teluk, ekosistem pantai, ekosistem dataran rendah dan ekosistem pegunungan (dataran tinggi). Kondisi yang sama dimiliki

pula oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah administratif Provinsi Papua Barat, termasuk kondisi sosial budaya yang beragam pula sesuai dengan karakteristik ekosistem wilayahnya. Beberapa kabupaten memiliki komoditas unggulan yang bersifat sejenis, komplementer dan bahkan berbeda, dengan kondisi sosial dan budaya yang sama atau berbeda.

Karakteristik-karakteristik tersebut yang akan dijadikan indikator untuk mengelompokkan kawasan pengembangan dengan dasar memiliki sumberdaya sejenis dan atau komplementer yang didukung oleh kondisi sosial dan budaya relatif seragam (satu suku besar). Setiap ekosistem (ekoregion) memiliki komoditas unggulan yang sudah dikembangkan, tetapi juga memiliki potensi sumberdaya alam dominan yang perlu dikembangkan. Berdasarkan potensi sumberdaya alam, terdapat keragaman sumberdaya lahan, tambang, hutan, perairan laut, perairan darat dan bentang alam (keindahan alam). Potensi sumberdaya tersebut memiliki tingkat dominasi yang bervariasi, tetapi sulit untuk dipisahkan karena saling tumpang tindih. Oleh karena itu, pilihan strategi berbasis sumberdaya alam haruslah didasarkan pada potensi sumberdaya alam dominan yang sejenis dan atau komplementer. Dari segi sumberdaya manusia, pilihan strateginya didasarkan pada cakupan wilayah suku besar (Kekerabatan). Strategi ini dipilih terkait dengan penguasaan sumberdaya alam menurut nilai-nilai adat (budaya).

6.2.2. Basis Komoditas Unggulan

Keragaman komoditas unggulan ini menjadi tema utama dalam menentukan kawasan pengembangan. Komoditas unggulan pada setiap ekosistem ada yang telah dikembangkan dan menjadi ciri khas Kabupaten/Kota, tetapi ada pula komoditas unggulan yang potensial dikembangkan untuk menjadi ciri dari kawasan pengembangan yang dibentuk. Selain itu terdapat pula komoditas-komoditas unggulan di setiap kawasan yang merupakan sumberdaya buatan yang telah lama dikembangkan, sebagai contoh kakao, kelapa, kelapa sawit dan buah-buahan (rambutan dan durian).

Pengembangan komoditi unggulan tersebut erat kaitannya dengan kesesuaian potensi sumberdaya lahan dan iklim di setiap wilayah. Pilihan strategi pembentukan kawasan pengembangan berbasis komoditas unggulan tidak terlepas dari pertimbangan karakteristik ekosistem (ecoregion), efisiensi dan penyebaran (bukan pemusatan). Oleh karena itu, strategi penentuan kawasan pengembangan berbasis komoditas unggulan didasarkan pada kelompok komoditas unggulan yang sudah dikembangkan baik alam maupun buatan serta ketersediaan sumberdaya lahan yang sesuai untuk perluasannya serta dukungan infrastruktur penunjang sirkulasi produk akhir.

6.2.3. Basis Efisiensi

Kawasan pengembangan Provinsi Papua Barat yang akan dibentuk memiliki cakupan areal yang beragam luasnya dengan batas-batas "imajiner" menurut fisik dan non fisik baik antar kawasan pengembangan maupun antar pusat pertumbuhan dalam kawasan pengembangan. Untuk itu pilihan strategi pembentukan harus didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada yang mampu mendukung aksesibilitas

wilayah dalam kawasan pengembangan. Jaringan-jaringan penghubung koridor sirkulasi ekonomi, sosial dan layanan jasa harus dapat dijamin oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Faktor efisiensi ditentukan oleh adanya faktor pengikat antar pusat pertumbuhan dalam kawasan pengembangan yang merupakan jalur koridor sirkulasi. Aspek terpenting adalah jalur-jalur transportasi darat, laut dan udara yang telah ada serta yang mungkin dapat dikembangkan. Berbagai fasilitas terminal transportasi yang ada (pelabuhan, bandar udara dan terminal angkutan darat) menjadi faktor penentu strategi ini. Strategi ini akan ditentukan oleh karakteristik wilayah di setiap kawasan pengembangan. Oleh karena itu strategi penentuan kawasan pengembangan didasarkan ketersediaan koridor-koridor sirkulasi yang mampu menghubungkan antar pusat pengembangan dalam kawasan pengembangan atau antar kawasan pengembangan dengan satu titik atau lebih simpul di setiap kawasan pengembangan. Simpul antar kawasan harus pula terhubung dengan simpul akhir atau outlet (Pintu Gerbang) yang aksesibilitasnya tinggi baik ke Provinsi maupun ke luar provinsi.

6.2.4. Basis Penyebaran (Non-Aglomeratif).

Kawasan Pengembangan Provinsi Papua Barat dengan konsep penyebaran non-aglomeratif adalah penentuan kawasan yang didasarkan pada prinsip pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Kawasan pengembangan bukan merupakan pemusatan satu kegiatan ekonomi tertentu saja, melainkan pengelompokan beberapa kegiatan ekonomi untuk beberapa komoditas atau suplementer. Diharapkan dengan konsep ini dalam suatu kawasan pengembangan terdapat serangkaian kegiatan ekonomi yang saling tunjang menunjang. Hal ini tercermin dari pusat-pusat pertumbuhan dalam kawasan pengembangan dapat saja terdiri dari satu atau lebih kegiatan ekonomi/investasi baik terpadu atau hanya kegiatan ekonomi hilir atau hulu saja. Namun antara kegiatan ekonomi hilir dan hulu di setiap pusat pertumbuhan harus saling tunjang menunjang dan terhubung oleh satu koridor sirkulas, sehingga dalam satu kawasan pengembangan merupakan perpaduan antara berbagai kegiatan ekonomi/ investasi.

Berdasarkan strategi pilihan di atas, maka setiap Kawasan Pengembangan memiliki sumberdaya utama/komoditas yang telah berkembang, dan atau sumberdaya maupun komoditas lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta potensi pasar tersedia. Sumberdaya utama/komoditas unggulan suatu Kawasan Pengembangan nantinya menjadi tema sentral yang akan diunggulkan dari Kawasan Pengembangan tersebut yang tercermin dari keragaan pusat-pusat pertumbuhan di dalam kawasan pengembangan bersangkutan.

6.2.5. Hasil identifikasi kawasan pengembangan.

Merujuk pada bab 2 dan 3 Potret Wilayah, Keragaan Masalah dan Isu Pakok, serta pilihan strategi yang dianut, maka keragaan Kawasan Pengembangan dalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi (RPWI) Provinsi Papua Barat dideskripsikan seperti pada Matriks Tabel 6.1. Karakteristik setiap Kawasan Pengembangan Provinsi Papua Barat dianalisis berdasarkan

cakupan areal, unsur pengikat, sumberdaya/komoditas unggulan, potensi pasar, serta posisi kawasan pengembangan dalam skala provinsi dan nasional.

Tabel 6.1. Matriks deksripsi Kawasan Pengembangan (KP) Provinsi Papua Barat.

No.	KP	Cakupan Areal	Unsur Pengikat	Komoditas Unggulan	Potensi Pasar	Posisi Kawasan
1.	I	Sorong Kab. –Sorong Kota	Jalur Transportasi Darat, Pelabuhan Udara dan Laut	1. Minyak dan Gas Bumi, batubara 2. Ikan dan Udang 3. Hortikultura	Domestik- Eksport	Pintu Gerbang
2.	II	FakFak-Kaimana-Bintuni	Transportasi Laut, darat dan Komoditas Unggulan sejenis	1. Pala 2. Ikan dan Udang, Teripang 3. Minyak dan Gas Bumi	Domestik dan eksport	Jalur Pantai Selatan dan teluk
3.	III	Sorong Selatan-Bintuni-FakFak	Transportasi Darat dan Komoditas Unggulan sejenis	1. Sagu 2. Ikan dan Udang 3. Batubara	Domestik- Eksport	Jalur Pantai Selatan
4.	IV	Raja Ampat-Sorong-Manokwari	Transportasi Laut dan Komoditas Unggulan Sejenis	1. Mineral logam dan Batubara 2. Ikan, Mutiara, Rumput laut 3. Wisata Bahari	Domestik – Ekport	Jalur Pantai Utara
5.	V	Kaimana-Wondama-Bintuni-Manokwari	Transportasi Laut, keseragaman ekosistem	1. Ikan, Udang, mutiara dan Teripang 2. Wisata Bahari 3. Hasil Hutan Non Kayu	Domestik- eksport	Jalur Pantai Timur
6.	VI	Manokwari-Sorong Selatan-Bintuni	Keseragaman Komoditas Unggulan	1. Kelapa Sawit dan Kakao 2. Hortikultura 3. Hasil Hutan Kayu	Domestik - eksport	Jalur Utara Tengah

Deskripsi matriks menunjukkan bahwa karakteristik kawasan pengembangan wilayah dan investasi Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

- Cakupan areal setiap kawasan pengembangan dapat bersifat lintas batas administrasi kabupaten/kota dengan batas imajiner dimana dapat terjadi satu kawasan pengembangan

terdiri dari satu atau kabupaten/kota dan sebaliknya, satu wilayah kabupaten tercakup dalam lebih dari satu kawasan pengembangan.

- Unsur pengikat setiap kawasan pengembangan, yang dapat berbasis ekosistem, potensi sumberdaya alam, komoditas unggulan, efisiensi dan penyebaran (non aglomerasi) atau sifat fisik (geomorfologis), seperti jalur jalan, jalur laut dan udara.
- Sumberdaya utama atau komoditas unggulan yang telah berkembang, atau sumberdaya lain atau komoditas lain yang diusulkan, mencakup sumberdaya/komoditas yang terdapat di kawasan pengembangan tersebut.
- Potensi pasar tersedia saat ini dan yang menjadi sasaran pasar dari komoditas yang dihasilkan, baik dilihat dari skala lokal, provinsi, nasional dan internasional.
- Posisi kawasan pengembangan dalam siklus perkembangan wilayah Papua Barat dan keterkaitannya dengan kawasan pengembangan lain yang memiliki akses ke dalam dan luar provinsi yang dapat dilalui melalui darat, laut dan udara.

6.3. Penyebaran Pusat Pertumbuhan

Sebaran pusat pertumbuhan dalam setiap wilayah pengembangan memiliki kapasitas dan aksesibilitas yang berbeda. Terdapat pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari potensi sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karenanya akan ada pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pengembangan yang membutuhkan tingkat pengembangan yang berbeda intensitasnya. Tingkatan dan intensitas pengembangan tersebut tentunya harus ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang konsisten baik dari segi regulasi maupun segi pendanaan yang akomodatif dan terintegrasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis kapasitas setiap pusat pertumbuhan yang terdapat di dalam setiap wilayah Pengembangan. Analisis kapasitas didasarkan pada indikator potensi sumberdaya alam, ketersediaan Infrastruktur, penguasaan teknologi dan kualitas Sumberdaya Manusia.

6.3.1. Analisis Kapasitas Pusat Pertumbuhan

Matriks analisis kapasitas Pusat Pertumbuhan (PP) dalam setiap wilayah Pengembangan yang didasarkan pada potensi sumberdaya alam, Ketersediaan infrastruktur, penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia seperti dideskripsikan pada matriks Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Matriks analisis kapasitas Pusat Pertumbuhan (PP) Kawasan Pengembangan (KP)

Kawasan Pengembangan	Kapasitas Kawasan	Cakupan areal kawasan pengembangan								
		Mkw	T.Wd	SrgKt	SrgKb	Rj.4	SrgSl	Bin.	Kai	FF
I	SDA	-	-	ky	ky	-	-	-	-	-
	SDM	-	-	ck	ck	-	-	-	-	-
	INFR.	-	-	ck	ck	-	-	-	-	-
	TECK.	-	-	tg	tg	-	-	-	-	-
II	SDA	-	-	-	-	-	-	ky	ky	ky
	SDM	-	-	-	-	-	-	lm	lm	kt
	INFR.	-	-	-	-	-	-	kr	kr	ku
	TECK.	-	-	-	-	-	-	tg	rd	rd
III	SDA	-	-	-	-	-	ky	ky	-	ky
	SDM	-	-	-	-	-	lm	lm	-	kt
	INFR.	-	-	-	-	-	kr	kr	-	cu
	TECK.	-	-	-	-	-	rd	tg	-	rd
IV	SDA	ky	-	ky	ky	ky	-	-	-	-
	SDM	ck	-	ck	ck	lm	-	-	-	-
	INFR.	ck	-	ck	ck	kr	-	-	-	-
	TECK.	tg	-	tg	tg	tg	-	-	-	-
V	SDA	ky	ky	-	-	-	-	ky	ky	-
	SDM	ck	lm	-	-	-	-	lm	lm	-
	INFR	ck	kr	-	-	-	-	kr	kr	-
	TECK	tg	tg	-	-	-	-	tg	rd	-
VI	SDA	ky	-	-	-	-	ky	ky	-	-
	SDM	ck	-	-	-	-	lm	lm	-	-
	INFR	ck	-	-	-	-	kr	kr	-	-
	TECK	tg	-	-	-	-	rd	tg	-	-

Ket.: SDA (Sumberdaya Alam) = ky (kaya); mk (miskin); INFR (Infrastruktur) = ck (cukup); kr (kurang); SDM (Sumberdaya Manusia) = kt (kuat); lm (lemah); TECK (Tecknologi) = tg (tinggi); rd (rendah).

Berdasarkan hasil analisis kapasitas pusat pertumbuhan (PP) pada setiap Kawasan Pengembangan (KP), teridentifikasi penyebaran pusat pertumbuhan sebagai simpul-simpul koridor sirkulasi dalam kawasan pengembangan, antar kawasan pengembangan dan simpul di luar kawasan pengembangan (pintu gerbang). Simpul-simpul koridor sirkulasi tersebut dikelompokkan menjadi tiga tipe pusat pertumbuhan, yaitu Pusat Pertumbuhan Primer, Pusat Pertumbuhan

Sekunder dan Pusat Pertumbuhan tersier. Batasan ke tiga pusat pertumbuhan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pusat pertumbuhan Primer yaitu simpul koridor sirkulasi akhir (Terminal). Simpul tersier ini merupakan pintu masuk dan keluar wilayah pengembangan provinsi (pintu gerbang) yang berlokasi di Sorong Kota dan Manokwari
- 2) Pusat Pertumbuhan Sekunder, yaitu simpul koridor sirkulasi yang menghubungkan pusat pertumbuhan dari pusat pertumbuhan tersier antar kawasan pengembangan dalam wilayah pengembangan (Sub. Terminal). Pusat Pertumbuhan Sekunder berlokasi di Sorong Kota, Manokwari dan Fak-Fak
- 3) Pusat Pertumbuhan Tersier yaitu simpul koridor sirkulasi dari pusat-pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam satu kawasan Pengembangan (Terminal Penghubung). Pusat pertumbuhan primer berlokasi di Sorong Kabupaten, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Wondama dan Kaimana

Persebaran pusat-pusat pertumbuhan tersebut dan kemungkinan jalur penghubung sebagai koridor sirkulasi guna penentuan batas wilayah imajinatif berbasis ekoregion seperti tampak pada Peta Gambar 6.1.

Dengan pusat-pusat persebaran tersebut, diharapkan simpul-simpul sirkulasi yang ada yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan harus dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wilayahnya. Pusat-pusat pertumbuhan primer, harus dapat bermitra dan saling mendukung dalam hal penyiapan infrastruktur pada pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kawasan pengembangannya. Kesepakatan-kesepakatan perlu diambil baik dari segi peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan pada masing-masing Pusat Pertumbuhan tersier. Pusat tersier ini memiliki peran dan tanggung jawab sebagai sentral percepatan pengembangan wilayah dan efisiensi investasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kawasan pengembangannya. Juga berfungsi sebagai terminal penghubung dengan pusat pertumbuhan sekunder dalam wilayah pengembangannya. Pusat pertumbuhan sekunder berperan dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai program pembangunan wilayah dan menjadi sub terminal antar kawasan pengembangan serta menjamin efisiensi sirkulasi kegiatan investasi dan penyebaran hasil-hasilnya ke dalam dan keluar kawasan. Sedangkan pusat pertumbuhan primer adalah terminal akhir dari penyebaran hasil-hasil kegiatan ekonomi/investasi dari dalam kawasan pengembangan yang bersumber dari pusat pertumbuhan sekunder dan tersier. Juga merupakan terminal awal masuknya berbagai sarana dan prasarana pendukung ke dalam kawasan pengembangan dalam RPWI Provinsi dan merupakan terminal penghubung dengan pusat pemerintahan provinsi untuk berbagai aktivitas yang membutuhkan pelayanan pemerintah provinsi yang mendukung program pengembangan wilayah dan investasi di seluruh kawasan pengembangan.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab setiap pusat pertumbuhan tersebut, maka rekomendasi spesifik yang mungkin memiliki tingkat penerapan dan pengelolaan yang tinggi dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan wilayah dan investasi untuk membuka isolasi wilayah dan infrastruktur penyediaan bahan baku, dimulai dari Pusat Pertumbuhan tersier ke dan di pusat sumber bahan baku.
- 2) Pengembangan wilayah dan investasi untuk sarana dan prasarana pendukung investasi, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi serta pengembangan industri hulu dimulai dari Pusat Pertumbuhan sekunder dan di pusat pertumbuhan tersier
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung investasi, infrastruktur utama penyebaran hasil investasi, infrastruktur industri hilir, infrastruktur permodalan dimulai dari Pusat Primer dan di pusat pertumbuhan sekunder.
- 4) Pengembangan pusat informasi pasar, pengolahan hasil akhir, pusat pemasaran hasil akhir dan berbagai fasilitas menunjang akses masuk dan keluar berada di pusat pertumbuhan primer.

Dengan pola demikian, maka koordinasi antar sektor terkait dalam rangka menyiapkan berbagai perangkat penunjang kegiatan pengembangan wilayah dan investasi tidak lagi mempertahankan ego sektoralnya tetapi mengupayakan sinergitas lintas sektoral yang menunjang menunjang dalam kerangka sistem. Khusus pada pusat Pertumbuhan Tersier, dapat terdiri dari satu atau lebih kegiatan investasi bergantung pada komoditas unggulan atau sumberdaya potensial sejenis atau komplementer yang akan dikembangkan.

6.3.2. Komposisi Program

A. Program Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah (PPW)

Pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ditentukan sebelumnya (point 6.2.1), selanjutnya diurutkan berdasarkan peranan setiap sektor unggulan ekonomi. Setiap kabupaten/kota ditetapkan satu atau beberapa pusat pengembangan sesuai dengan cakupan layanan kabupaten/kota tersebut. Penetapan pusat pengembangan wilayah didasarkan pada pertimbangan wilayah andalan konvensional dan sebaran komoditi andalan yang dimiliki kabupaten/kota. Pusat-pusat pengembangan adalah kabupaten/atau kota meliputi:

- 1) PPW Primer merupakan simpul koridor sirkulasi akhir (terminal) dan pintu masuk dan keluar wilayah pengembangan provinsi (pintu gerbang) yang berlokasi di Sorong Kota dan Manokwari;
- 2) PPW Sekunder merupakan koridor sirkulasi yang menghubungkan pusat pertumbuhan dari pusat pertumbuhan tersier antar kawasan pengembangan dalam wilayah pengembangan. Pusat Pertumbuhan Sekunder berlokasi di Sorong Kota, Manokwari dan Fak-Fak (Sektor Industri);
- 3) PPW tersier meliputi Pusat pertumbuhan tersier berlokasi di Sorong Kabupaten, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Manokwari, dan Kaimana. (Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultur, dll)

- 4) PPW Lokal merupakan pusat pertumbuhan tersier yang secara khusus berkembang dengan potensi lokal, yang berlokasi di Kabupaten Raja Ampat dan Wondama (Potensi Lokal)

Penetapan PPW ini didasarkan karena ada kabupaten/kota yang hierarkinya lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya dan mempunyai peranan cukup penting. Implikasi komposisi program dalam pusat-pusat pengembangan akan memerlukan beberapa investasi prasarana dan sarana guna mendukung penetapan pengembangan wilayah tersebut. Setiap kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Papua selanjutnya dinilai berdasarkan potensi wilayah, sebaran sumberdaya alam (potensi dan permasalahan) dan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

B. Program Pengembangan Pusat Prasarana dan Sarana

Rencana pengembangan pusat prasarana dan sarana ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan sektor tersebut berdasarkan pusat-pusat pengembangan di atas. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa pelabuhan bongkar muat barang dan pelabuhan khusus untuk perikanan masih sangat terbatas. Seiring dengan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dan peran masing-masing kabupaten/kota sebagai pusat pengembangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu direncanakan untuk pengembangan pelabuhan umum (laut dan udara), peti kemas dan pelabuhan perikanan (yang lokasinya disesuaikan dengan lokasi fishing ground). Program pelabuhan perikanan dan niaga tersebut disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.3. Rencana Pengembangan Pelabuhan pada PWPI

No.	Kabupaten/Kota	Pelabuhan (kondisi sekarang)		Penambahan Fasilitas
		Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Niaga	
1.	Sorong Kota	v	v	Pelabuhan peti kemas
2.	Fakfak	-	v	Pelabuhan peti kemas dan perikanan
3.	Manokwari	-	v	Pelabuhan peti kemas

C. Program Pengembangan Jaringan Transportasi

Sistem transportasi di Provinsi Papua Barat merupakan sistem transportasi yang menerapkan hampir seluruh sarana transportasi yang ada, di antaranya transportasi darat, laut dan udara. Sampai saat ini sarana transportasi yang dominan adalah transportasi laut dan udara mengingat sebaran wilayah yang sangat besar. Sarana transportasi darat sebaliknya berkembang sangat lambat, dan masih banyaknya ruas-ruas jalan yang belum berfungsi dengan baik, sehingga keterpaduan antara transportasi darat dan laut belum optimal, begitupula antara kabupaten belum tersambung dengan jalan darat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi di Propinsi Papua Barat, jaringan transportasi laut perlu diselaraskan dengan transportasi darat. Penyelarasan ini dilakukan dengan alasan: Pertama, sistem transportasi laut lebih luwes dalam memilih jalur dan sistem transportasi darat secara fungsional belum mampu menghubungkan secara merata wilayah-wilayah dan masih banyak wilayah di Provinsi Papua Barat yang masih terisolasi.

a. Sistem Perhubungan Laut

Program pembangunan transportasi laut adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar daerah yang terintegrasi dan terpadu dengan sarana transportasi lainnya. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut bertujuan untuk menata struktur pelabuhan laut mulai dari pelabuhan peti kemas secara konvensional, pelabuhan khusus, pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis. Hal ini berkaitan dengan peningkatan fungsi pelabuhan pengumpul dan pengumpan agar tercapai efisiensi dalam investasi dan kegiatan operasional sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. Peningkatan fasilitas pelabuhan peti kemas secara konvensional perlu dilaksanakan di Sorong dan Manokwari.

Pengembangan fasilitas keselamatan pelayaran ditujukan untuk memperlancar arus lalu lintas kapal serta mengurangi kecelakaan dan pencemaran laut. Kegiatan ini akan membutuhkan sarana bantu navigasi dan telokomunikasi pelayaran, pemeliharaan kedalaman alur pelayaran, serta menegakkan pemyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Pembinaan dan pengembangan armada pelayaran mencakup kegiatan pembangunan dan pengembangan armada nasional yang meliputi armada pelayaran nusantara, armada pelayaran rakyat, armada pelayaran perintis, maupun armada pelayaran samudra. Dalam hal ini yang paling utama adalah menciptakan pola jaringan yang saling menunjang dan berkaitan antar berbagai jenis pelayaran sehingga membentuk suatu jaringan pelayaran yang efisien, mulai hubungan di dalam Propinsi Papua Barat maupun hubungan keluar Papua Barat.

Untuk memberikan pelayanan pada daerah terpencil, maka armada perintis masih merupakan andalan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sehingga perlu ditingkatkan/penambahan jumlah kapal, serta pengoperasian kapal sub perintis laut. Disamping itu, dalam rangka memperlancar angkutan penumpang melalui kapal cepat Pelnib baik antar dan intra wilayah perlu penambahan jumlah kapal cepat yang beroperasi di daerah Papua Barat diusahakan untuk melayani kebutuhan yang makin meningkat. Pengembangan pelabuhan dan kapal penyeberangan pulau-pulau dan sungai untuk menjangkau distrik terpencil juga merupakan program pengembangan prioritas.

b. Sistem Perhubungan Udara

Program pembangunan transportasi udara adalah menyediakan armada udara, fasilitas Bandar Udara, fasilitas keselamatan penerbangan dan lalu lintas udara yang memadai, serta dapat diandalkan. Pengembangan Fasilitas Bandar Udara. Pengembangan Fasilitas Bandar Udara ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, frekuensi tingkat keselamatan dan keamanan serta kenyamanan. Pengembangan Bandar Udara diarahkan untuk mengembangkan Bandar udara pusat penyebaran Merauke dan Sorong. Untuk Bandara Sorong saat ini telah dalam peningkatan sementara untuk Bandara Manokwari masih belum mencukupi. Disamping itu, perlu ditingkatkan fasilitas Bandara Bintuni, Fakfak, Kaimana, Wondama dan Sorong Selatan.

Pengembangan keselamatan terutama ditujukan untuk memenuhi persyaratan penerbangan internasional serta meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas udara yang mencakup upaya pengendalian lalu lintas penerbangan dan lalu lintas udara meliputi pemasangan

dan rehabilitasi peralatan telekomunikasi, navigasi udara, dan listrik terutama pada bandara/lapтер yang sudah berfungsi yang tersebar di seluruh wilayah.

Pembinaan dan pengembangan armada udara ditujukan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan dan keamanan serta pelayanan serta efisiensi pengoperasian armada udara. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas pelayanan baik oleh perusahaan penerbangan swasta maupun badan usaha milik negara melalui pengoperasian pesawat yang handal dan sesuai dengan kondisi prasarana transportasi udara yang ada di Papua. Dalam upaya melepaskan keterisolasian daerah terpencil dan daerah terbelakang yang tidak dapat dijangkau oleh sistem transportasi lainnya karena kondisi iklim, perlu ditingkatkan pengoperasian armada udara perintis.

c. Sistem Transportasi Darat.

Program pembangunan jaringan transportasi darat diprioritaskan pada pembangunan jalur Trans Papua terutama yang menghubungkan delapan Kabupaten. Jalur transportasi darat yang telah ada di setiap Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama jalur jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Jalur-jalur jalan darat yang menghubungkan antar distrik di setiap Kabupaten perlu pula mendapat perhatian, terutama pada distrik-distrik yang termasuk dalam pusat pertumbuhan di setiap wilayah pengembangan dan investasi. Pengembangan jaringan transportasi darat harus sinergi dengan rencana pengembangan wilayah dan investasi terutama dengan pengembangan pelabuhan laut, pengembangan pusat-pusat pengembangan ekonomi dan pasar. Dalam pengembangan tersebut, perlu pula direncanakan terminal-terminal utama yang berlokasi pada simpul-simpul jalur darat penghubung antar wilayah kabupaten/kota, minimal pada setiap pusat pertumbuhan baik primer, sekunder dan tersier terdapat satu terminal utama (Terminal Antar Wilayah) termasuk infrastruktur pendukungnya.

Untuk Pengembangan jalur transportasi darat ini, pemaduan rencana pada tingkat provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi sangat penting dan komitmen bersama guna mempercepat terwujudnya jalur trans Papua Barat yang mampu menghubungkan seluruh Kabupaten di wilayah ini.

D. Program Pemanfaatan Ruang Wilayah

a. Zona Kawasan Konservasi

Sesuai dengan potensi ekonomi utama, maka di dalam kawasan konservasi yang telah dirumuskan, maka terdapat 4 (empat) kelompok aktivitas utama, yaitu (1) pariwisata, (2) pemanfaatan hasil terbatas, (3) perhubungan, dan (4) pemukiman penduduk. Dari ke empat aktivitas tersebut, hanya aktivitas pariwisata yang mungkin diperbolehkan dilakukan intensif. Kegiatan lain dapat dilakukan dengan skala yang sangat terbatas sesuai dengan fungsi masing-masing jenis kawasan konservasi.

b. Zona Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Kriteria kawasan budidaya wilayah merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau kegiatan dan yang terbagi dalam:

- 1) Kriteria teknis sektoral, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, kesesuaian ruang, dan bebas bencana; dan
- 2) Kriteria ruang, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan budidaya dalam kawasan, menghasilkan nilai sinergi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didasarkan pada azas-azas sebagai berikut :
 - Saling menunjang antarkegiatan yang meliputi; (1) peningkatan daya guna pemanfaatan ruang serta sumberdaya yang ada di dalamnya guna perkembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya; dan (2) dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.
 - Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi: (1) jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam waktu panjang; dan (2) jaminan terhadap kualitas lingkungan hidup.
 - Tanggap terhadap dinamika perkembangan yang meliputi : (1) peningkatan pendapatan masyarakat; (2) peningkatan pendapatan daerah dan wilayah; (3) peningkatan kesempatan kerja; (4) peningkatan ekspor; (5) peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

c. Zone Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas merupakan kawasan-kawasan dengan potensi dan atau permasalahan tertentu yang perlu diprioritaskan penanganannya secara sektoral maupun tata ruang, karena memiliki dampak yang penting pada upaya pencapaian tujuan pengembangan wilayah. Dampak penting yang dimaksud dapat bersifat positif, atau sebaliknya bersifat negatif terhadap proses dan totalitas kinerja perkembangan wilayah. Dampak positif terutama karena suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi sehingga berkembangnya kawasan mampu mendorong dan menjadi "triger" bagi perkembangan kawasan-kawasan lain di sekitarnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, sejalan dengan arahan struktur serta pemanfaatan ruang daratan dan ruang lautan yang telah dikemukakan pada beberapa sub bab sebelumnya maka kawasan prioritas di wilayah Papua Barat dapat dikelompokkan atas: Kawasan Tumbuh Cepat, Kawasan Potensial Tumbuh Cepat, Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan Tertinggal. Masing-masing kawasan prioritas diuraikan sebagai berikut :

- 1) ***Kawasan Tumbuh Cepat.*** Kawasan-kawasan ini pada kondisi eksistingnya sekarang telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan cepat sehingga memerlukan prioritas penanganan yang menerus dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Fokus penanganan tidak hanya ditujukan pada upaya mengoptimalkan proses dan kinerja pertumbuhan sektor-sektor produktif di kawasan, namun juga pada upaya pengendalian perkembangan fisik kawasan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kawasan Sorong dan sekitarnya

- 2) **Kawasan Potensial Tumbuh Cepat.** Kawasan-kawasan yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kawasan Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Fak-Fak dan Kaimana. Khusus untuk Teluk Bintuni sekalipun potensial Tumbuh Cepat, namun harus dengan pengawasan ketat terhadap pelestarian lingkungan.
- 3) **Kawasan Rawan Bencana Alam.** Bencana alam yang potensial mengancam sejumlah kawasan di wilayah Papua adalah bencana gempa bumi dan Tsunami di Kabupaten Manokwari dan Wondama, yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan,
- 4) **Kawasan Tertinggal.** Kawasan ini merupakan kawasan berpenduduk maupun tidak berpenduduk dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif yang relatif lambat dibanding kawasan lain. Kawasan yang termasuk kategori ini adalah pegunungan Manokwari – Sorong, dan Manokwari – Wondama.

Program penataan ruang wilayah Provinsi Papua Barat perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan wilayah pesisir dan laut, sehingga konteks pengembangan kawasan yang sudah ditetapkan dapat saling memberikan sinergis pemanfaatan sumberdaya yang berkesinambungan. Dengan demikian penataan kawasan tidak lagi menonjolkan potensi yang ada di darat, tetapi juga pada potensi sumberdaya pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah dapat didasarkan pada daerah kabupaten/kota yang sudah memilikinya, dan bagi kabupaten yang belum memiliki dokumen penataan ruang didorong untuk membuatnya, dan pada gilirannya dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun penataan ruang wilayah provinsi.

E. Program Peluang Investasi Sektor Unggulan

Peluang Investasi Pengembangan Propinsi Papua Barat menyangkut penyediaan prasarana dan sarana, kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, jaringan pemasaran, dan kegiatan pariwisata. Investasi penyediaan sarana akan berkembang seiring dibukanya isolasi daerah pengembangan dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam sebagai sumberdaya alam atau komoditas unggulan yang tersebar pada setiap kawasan pengembangan (Tabel 6.3).

Tabel 6.4. Peluang Investasi pada berbagai Komoditas/Sumberdaya Alam Unggulan

No.	Kawasan Pengembangan	Cakupan Areal	Sumberdaya Alam Unggulan
1.	I	Sorong Kab. –Sorong Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak dan gas bumi, batubara • Ikan dan udang • Hortikultura
2.	II	FakFak-Kaimana-Bintuni	<ul style="list-style-type: none"> • Pala • Ikan dan udang, Teripang • Minyak dan gas bumi
3.	III	Sorong Selatan-Bintuni-FakFak	<ul style="list-style-type: none"> • Sagu • Ikan dan udang • Batubara

4.	IV	Raja Ampat-Sorong-Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> • Mineral logam dan batubara • Ikan, mutiara, rumput laut • Wisata bahari
5.	V	Kaimana-Wondama-Bintuni-Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan, udang, mutiara dan teripang • Wisata bahari • Hasil hutan Non kayu
6.	VI	Manokwari-Sorong Selatan-Bintuni	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit dan kakao • Hortikultura • Hasil hutan kayu

F. Program Pemasaran Hasil

Pemasaran hasil antar wilayah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan regional, dan bahkan nasional, dan internasional. Bentuk-bentuk produk yang dipasarkan dari kegiatan perikanan adalah produk segar meliputi ikan jenis cakalang, julung, selar, teri, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Disamping produk segar juga dipasarkan produk beku serta olahan.

Dalam pengembangan pola pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan banyak kendala yang dihadapi baik oleh pelaku ekonomi maupun pengelola. Hambatan tersebut meliputi:

- 1) Sentra produksi merupakan daerah remote yang tidak didukung oleh sarana transportasi yang memadai;
- 2) Penanganan pasca produksi masih belum dapat mengakomodasi permintaan pasar,
- 3) Volume dan jenis produk yang dipasarkan sering tidak ekonomis
- 4) Posisi tawar pada umumnya masih rendah, karena struktur pasarnya biasanya buyer market.
- 5) Tidak tersedianya pusat-pusat pemasaran yang dapat menjamin pasar.

Untuk meminimalkan kendala-kendala dalam pemasaran produk-produk diperlukan program-program agar dicapai hasil yang optimal, yang meliputi:

- Penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memasarkan hasil perikanan,
- Penambahan laboratorium uji mutu yang dapat meningkatkan mutu hasil produksi,
- Perlu selektif dalam produksi, yaitu jenis-jenis yang diminati oleh pasar (market based), misalnya kerapu hidup lebih diminati oleh pasar ekspor, dsb.

Organisasi pemasaran petani/nelayan perlu diperkuat guna meningkatkan posisi tawar. Selain itu kerjasama antar wilayah dan pengembangan pusat informasi adalah merupakan langkah yang sangat tepat agar petani/nelayan dapat memperoleh harga sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku secara adil. Pembangunan pusat informasi ini selain memberikan informasi harga juga memberikan informasi produk yang diminati oleh pasar. Selain itu pembangunan kemitraan juga merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan posisi tawar petani/nelayan.

Pembangunan pusat-pusat pemasaran yang lebih menyebar akan menghemat biaya bagi petani/nelayan. Pusat-pusat pemasaran yang dibangun tersebut harus dilengkapi dengan pusat informasi pasar yang lebih adil sehingga penentuan harga produk tidak ditentukan secara sepihak melainkan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pusat informasi tersebut dan untuk menghindari adanya ketergantungan suatu produk, maka perlu adanya diversifikasi produk.

6.3.3. Integrasi Program

A. Pendekatan Sektoral

Dalam penyusunan indikator program penataan ruang sektoral yang dijabarkan dalam program pembangunan investasi daerah terkait dengan kewilayahannya ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Disusun berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada wilayah Provinsi Papua Barat.
- 2) Disusun berdasarkan potensi dan permasalahan sektoral yang ada di setiap kabupaten pada Provinsi Papua Barat.
- 3) Diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan penanganan skala prioritas
- 4) Disusun dengan memperhatikan keterpaduan usaha-usaha pembangunan antar sektor sesuai dengan tujuan pembangunan investasi wilayah.

Sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan daerah maka prioritas pembangunan harus diletakkan pada peningkatan pertumbuhan di bidang ekonomi secara luas. Adapun sektor-sektor pembangunan fisik yang harus dipertimbangkan di dalam program pembangunan serta sumber pembiayaannya adalah :

- 1) Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian secara umum dan subsektor perikanan secara khusus.
- 2) Pembangunan dan pengembangan sektor pertambangan
- 3) Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata.
- 4) Pembangunan dan pengembangan sektor pengangkutan.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan.
- 6) Pembangunan dan pengembangan sektor perumahan.
- 7) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah.

B. Pendekatan Kewilayahan

Model percepatan pembangunan akan dititik beratkan pada beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pola Pendekatan Pembangunan Berbasis komunitas Lokal (suku-suku bangsa).

Pola pendekatan pembangunan berbasis komunitas lokal merupakan satu wujud pembangunan manusia yang terfokus pada masyarakat lokal. Pendekatan ini sangat diperlukan mengingat selama ini keberadaan penduduk lokal kurang diposisikan dalam sistem

kegiatan ekonomi yang ada terutama dalam menjadikan penduduk lokal sebagai pusat pengambilan keputusan dalam sistem ekonomi terutama dalam hal pengelolaan sumberdaya alam.

Kekayaan sumberdaya alam yang ada harus lebih banyak dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu pertimbangan dalam pendekatan pembangunan yang dititik beratkan pada manusia adalah pendekatan pada kondisi sosial budaya yang sudah tertata melalui suatu lembaga adat berdasarkan suku-suku yang ada di Provinsi Papua Barat.

2. Pola Pendekatan Pembangunan Kawasan

Pola pendekatan kawasan merupakan suatu bentuk pendekatan pembangunan yang di arahkan pada pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis, potensial dan kawasan terisolasi. Dalam pengembangan kawasan akan di terapkan juga pendekatan kewenangan antar tingkat dalam administrasi pemerintahan. Untuk itu kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan di bakukan, sehingga terdapat suatu kesepakatan dan komitmen bersama dalam bentuk kewenangan pada masing-masing kawasan tersebut. Pembakuan kewenangan ini diperlukan, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan/kewenangan pemerintah dalam suatu kawasan.

6.3.4. Strategi Implementasi

Bila di tinjau dari fungsinya, secara umum pusat pertumbuhan dan pengembangan sistim kota-kota kabupaten di Provinsi Papua Barat hendaknya diarahkan sebagai :

1. Simpul pelayanan untuk wilayah belakang (relatif tertinggal)
2. Simpul komunikasi antar wilayah
3. Simpul kegiatan perdagangan dan jasa

Kelengkapan fungsi-fungsi utama kota di atas pada dasarnya bergantung dari status kota itu sendiri. Selain terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan yang lingkup pelayanannya sesuai dengan status administrasi (ibukota Provinsi, ibukota kabupaten dan ibukota distrik).

Penentuan fungsi kota umumnya didasarkan pada indikator kelengkapan fungsi pelayanan yang diberikan oleh wilayah tersebut. Fungsi pusat pelayanan wilayah belakang ditinjau dari keberadaan kota tersebut sebagai simpul koleksi distribusi dan pusat kegiatan perdagangan antar wilayah. Fungsi pusat komunikasi dilihat berdasarkan keberadaan fasilitas transportasi (pelabuhan laut dan udara) dan akses ke jaringan jalan regional. Adanya peningkatan hirarki serta pengembangan fungsi kota memberikan implikasi terhadap kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan pendukungnya. Untuk mengembangkan hirarki kota-kota di provinsi Papua Barat, hendaknya didasarkan kepada strategi yang telah dirumuskan dalam pengembangan Tata Ruang Makro dan Mikro. Kebijakan pengembangan menurut orde kotanya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kota Orde I (Manokwari dan Sorong Kota) yang mempunyai akses skala pelayanan Regional yang difungsikan sebagai :
 - Kota utama yang berperan difungsikan sebagai pusat pelayanan utama di Provinsi Papua Barat.
 - Pusat pemerintahan dan coorporasi pengembangan wilayah dan investasi
 - Pusat Pengembangan kegiatan industri hilir yang berskala menengah dan besar dengan skala pemasaran keluar daerah serta pusat pemasaran
 - Meningkatkan sistem prasarana dan sarana serta fasilitas sosial ekonomi sesuai dengan fungsi utama kota.
 - Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia bagian timur lain, baik melalui peningkatan prasarana dan sarana perhubungan laut dan perhubungan udara.
2. Pengembangan kota Orde II yang meliputi kota Fak-Fak, Sorong Kabupaten, dan Kaimana difungsikan sebagai:
 - Kota ke dua (*secondary cities*) yang melayani wilayah sub-regional dan menjembatani antar kota utama dengan kota-kota kecil dan daerah belakang.
 - Mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas sosial ekonomi perkotaan akan di kembangkan untuk melayani wilayah kabupaten.
 - Kegiatan industri yang akan di kembangkan adalah industri skala kecil sampai besar antara lain, industri bahan baku pertanian atau bahan galian untuk kebutuhan industri di kota-kota besar.
 - Membangun kegiatan ekonomi kota (industri, perdagangan dan jasa) untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja.
 - Pengembangan kota-kota kedua ini di ikuti dengan pembangunan jaringan jalan arteri antar kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat dan akan membentuk suatu sistem kota-kota.
3. Pengembangan kota Orde III yang meliputi Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong Selatan, dan Raja Ampat, difungsikan sebagai
 - Pusat pelayanan lokal, pusat pemasaran, layanan jasa dan distribusi barang konsumsi non pertanian.
 - Pusat Kegiatan investasi dan pengembangan industri hulu pengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi serta pusat penyedia bahan baku bagi industri-industri hilir.
 - Meningkatkan perannya sebagai pusat daerah pedalaman yang membangkitkan pertumbuhan dan perkembangan kantong-kantong produksi menjadi pusat pertumbuhan baru, sehingga dapat membentuk suatu sistem kota-kota di Papua Barat melalui jaringan jalan kolektor yang menghubungkan satu pusat dengan pusat lainnya.

Strategi implementasi demikian, maka sesuai dengan hirarki fungsi pemerintahan, maka pada tingkat provinsi secara institusional berfungsi sebagai koordinator dalam pengembangan wilayah dan investasi. Untuk menjalankan fungsi ini, maka di tingkat provinsi dapat dibentuk suatu tim Sistem Pengendali Perencanaan Pembangunan (SP3), yang diketuai oleh Kepala BP3D Provinsi. Tugas utamanya adalah mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Keanggotaannya merupakan perwakilan seluruh stakeholders pembangunan di daerah.

Pada tingkat kabupaten/kota, secara institusional berfungsi sebagai operasionalisasi koordinasi antar pengembangan wilayah dan investasi. Pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim SP3 Kabupaten/kota, yang diketuai oleh Kepala BP3D Kabupaten/kota. Tugas utamanya adalah mengendalikan pelaksanaan pengembangan wilayah dan investasi di wilayahnya dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan wilayah dan investasi dalam kawasan dan antar kawasan dalam wilayahnya maupun lintas wilayah.

Tim SP3 (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), harus benar-benar berkomitmen dan konsekuen untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dalam pengimplementasi RPWI yang telah disepakati bersama. Adanya pengawasan dan pengendalian ini, maka sinkronisasi pelaksanaan berbagai program pengembangan wilayah dan investasi dalam setiap kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan akan mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam kerangka pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua Barat.